

Flypaper Effect dan Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Magfirah Wahyu Ramadhani¹, Sri Utami², Dwi Utami³, Nurul Chalisa Majiding⁴,
Ambarwati Akib⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Makassar

e-mail: ¹magrifah.wahyu.ramadhani@unm.ac.id, ²sri.utami@unm.ac.id,

³dwi.utami@unm.ac.id, ⁴nurul.chalisa.majiding@unm.ac.id, ⁵ambarwati.akib@unm.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
01-08-2025	06-08-2025	07-08-2025

Abstrak - Penelitian ini menganalisis pengaruh Flypaper Effect terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi. Flypaper Effect terjadi ketika belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat daripada oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 hingga 2023 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer pusat, khususnya Dana Alokasi Umsum (DAU), memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sementara PAD memberikan kontribusi yang lebih kecil. Selain itu, hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa kapasitas fiskal, yang diukur melalui PAD, tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara dana transfer dan belanja daerah. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa meskipun daerah memiliki kapasitas fiskal, ketergantungan pada dana transfer pusat tetap dominan dalam memengaruhi belanja daerah. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori desentralisasi fiskal.

Kata Kunci: *Flypaper Effect*; Belanja Daerah; Kapasitas Fiskal; Dana Transfer; Pendapatan Asli Daerah

Abstract - This study analyzes the influence of the Flypaper Effect on regional expenditure in regencies/cities in South Sulawesi Province, with fiscal capacity as a moderating variable. The Flypaper Effect occurs when regional expenditure is more influenced by transfers from the central government than by Local Revenue (PAD). This research uses secondary data from the Regional Budget (APBD) reports for the years 2021 to 2023 from 24 regencies/cities in South Sulawesi. Using multiple linear regression analysis, the results indicate that central government transfers, particularly the General Allocation Fund (DAU), have a significant impact on regional expenditure, while PAD contributes to a lesser extent. Furthermore, the moderating test results show that fiscal capacity, measured through PAD, does not significantly moderate the relationship between transfer funds and regional expenditure. These findings provide empirical evidence that despite regional fiscal capacity, reliance on central government transfers remains dominant in influencing regional expenditure. This study offers insights for local governments to focus more on increasing PAD to reduce dependence on central transfers and contributes to the development of fiscal decentralization theory

Keywords: *Flypaper Effect*, *Regional Expenditure*, *Fiscal Capacity*, *Transfer Funds*, *Local Revenue*.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal adalah kapasitas fiskal, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya secara berkelanjutan untuk membiayai kebutuhan fiskalnya. Kapasitas fiskal yang memadai menjadi syarat utama agar pemerintah daerah tidak bergantung secara berlebihan pada transfer dana dari pemerintah pusat (Iskandar, 2021).

Namun, kapasitas fiskal daerah di Indonesia masih menunjukkan disparitas yang cukup lebar, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan., 2024), kapasitas fiskal kabupaten/kota di provinsi ini bervariasi dari kategori rendah hingga sedang. Kabupaten Bone memiliki indeks kapasitas fiskal sebesar 0,2929 (kategori rendah), sedangkan Kabupaten Bantaeng mencapai 0,8227 (kategori sedang). Kota Makassar sebagai pusat perekonomian memiliki PAD mencapai sekitar Rp 1,5 triliun per tahun, namun kabupaten lain seperti Bone dan Barru hanya mengandalkan PAD di kisaran Rp 40–300 miliar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Fenomena flypaper effect menjadi salah satu isu penting yang terkait dengan kondisi tersebut. Flypaper effect terjadi ketika dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH), lebih banyak mendorong peningkatan belanja daerah dibandingkan mendorong optimalisasi PAD. Dengan kata lain, dana transfer “menempel” pada belanja daerah seperti kertas lalat pada perekat, alih-alih menjadi stimulus bagi peningkatan kemandirian fiskal (Fitrianti et al., 2025). Penelitian (Abdillah, 2018) menemukan bahwa fenomena ini terjadi di wilayah Ajatappareng, Sulawesi Selatan, pada periode 2014–2016, di mana belanja pemerintah daerah meningkat seiring meningkatnya dana transfer, sementara kontribusi PAD cenderung stagnan. Temuan ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat.

Kondisi serupa juga dikemukakan oleh (Amrisal et al., 2024) yang menemukan bahwa rendahnya PAD disertai pertumbuhan PDRB yang belum optimal berkorelasi dengan meningkatnya risiko fiscal distress di kabupaten/kota Sulawesi Selatan. (Iskandar, 2021) menambahkan bahwa rendahnya kapasitas fiskal berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik di sektor-sektor strategis seperti kesehatan. Sementara itu, studi (Fitrianti et al., 2025) yang meneliti flypaper effect pada level provinsi memperkuat bukti empiris bahwa transfer dana pusat cenderung lebih memicu belanja daripada meningkatkan PAD. Walaupun relevan, penelitian tersebut belum menjangkau analisis mendalam di tingkat kabupaten/kota, khususnya di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara kapasitas fiskal dan fenomena flypaper effect pada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Selama ini, penelitian terkait kapasitas fiskal banyak membahas implikasinya terhadap kemandirian dan risiko fiskal, sementara kajian yang secara langsung mengaitkannya dengan flypaper effect masih jarang dilakukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis kapasitas fiskal dan fenomena flypaper effect secara bersamaan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan data terkini periode 2021–2023. Pendekatan ini memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif karena mampu menggambarkan sejauh mana kapasitas fiskal berperan dalam memengaruhi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan kajian sebelumnya yang umumnya hanya meneliti pada level provinsi

atau wilayah tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam pada konteks kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasi dan mengukur fenomena flypaper effect yang terjadi, serta mengkaji hubungan antara keduanya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai keuangan daerah serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskalnya.

REVIU LITERATUR

Teori Desentralisasi Fiskal

Penelitian ini berpijak pada Teori Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization Theory) yang merupakan bagian dari kajian Teori Ekonomi Publik (Public Finance Theory). (Oates, 1972) dalam Fiscal Federalism menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran secara mandiri, dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Namun, desentralisasi fiskal juga memunculkan tantangan berupa vertical fiscal imbalance (ketidakseimbangan fiskal vertikal) dan horizontal fiscal imbalance (ketidakseimbangan fiskal horizontal). Ketidakseimbangan fiskal vertikal terjadi ketika kewenangan belanja yang dimiliki daerah tidak sebanding dengan kemampuan pendapatannya, sedangkan ketidakseimbangan fiskal horizontal mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah pusat menyalurkan transfer fiskal kepada daerah melalui mekanisme Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Transfer

Dana transfer adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah serta menjamin ketersediaan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah. Dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU bersifat block grant yang penggunaannya fleksibel sesuai kebutuhan daerah, DAK bersifat earmarked grant yang diperuntukkan bagi pendanaan kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional, sedangkan DBH dialokasikan berdasarkan penerimaan pajak atau sumber daya alam yang berasal dari daerah tersebut.

Meskipun dana transfer dimaksudkan untuk mendukung penyediaan layanan publik dan pemerataan pembangunan, dalam praktiknya, tingginya proporsi dana transfer dalam pendapatan daerah seringkali menyebabkan fenomena flypaper effect. Fenomena ini terjadi ketika belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap PAD, sehingga dana transfer “menempel” pada belanja daerah dan tidak mendorong upaya peningkatan pendapatan daerah (Fitrianti et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD meliputi pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.

Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung lebih mandiri dan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyusun kebijakan belanja. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah seringkali menghadapi keterbatasan fiskal yang mengharuskannya bergantung pada dana transfer. Di Sulawesi Selatan, misalnya, Kota Makassar memiliki PAD sekitar Rp 1,5 triliun per tahun, sedangkan kabupaten seperti Barru dan Bone hanya berkisar Rp 40–300 miliar (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan., 2024). Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kapasitas pendapatan asli antar daerah di provinsi tersebut.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, belanja daerah dikategorikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Secara teori, struktur dan jumlah belanja daerah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD maupun dari dana transfer.

Dalam konteks flypaper effect, belanja daerah seringkali lebih dipengaruhi oleh besarnya dana transfer daripada PAD. Penelitian (Abdillah, 2018) menunjukkan bahwa di wilayah Ajatappareng, Sulawesi Selatan, periode 2014–2016, belanja daerah meningkat signifikan seiring dengan peningkatan dana transfer, sementara kontribusi PAD terhadap belanja relatif rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dapat mengurangi insentif daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri.

Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal adalah ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya dari sumber pendapatan yang dimiliki, terutama dari PAD dan bagi hasil pajak/sumber daya alam. Kementerian Keuangan melalui Peta Kapasitas Fiskal Daerah mengelompokkan kapasitas fiskal menjadi lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kapasitas fiskal yang tinggi mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang baik, sedangkan kapasitas fiskal yang rendah menunjukkan ketergantungan yang besar pada dana transfer pusat.

Data (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan., 2024) menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan terdapat disparitas kapasitas fiskal yang cukup lebar. Kabupaten Bone, misalnya, memiliki indeks kapasitas fiskal sebesar 0,2929 yang termasuk kategori rendah, sementara Kabupaten Bantaeng memiliki indeks sebesar 0,8227 yang masuk kategori sedang. Ketimpangan ini penting dianalisis karena dapat memengaruhi pola belanja dan tingkat ketergantungan fiskal masing-masing daerah.

Hipotesis

H1: Dana transfer dari pemerintah pusat berpengaruh lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Hipotesis ini menguji keberadaan flypaper effect, yaitu kondisi ketika belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer daripada PAD, sebagaimana ditemukan pada penelitian sebelumnya (Abdillah, 2018)

H2: Kapasitas fiskal memoderasi pengaruh flypaper effect terhadap belanja daerah, di mana pengaruh tersebut lebih lemah pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi.

Kapasitas fiskal mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi cenderung kurang bergantung pada dana transfer, sehingga pengaruh flypaper effect terhadap belanja daerah menjadi lebih kecil dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal-komparatif untuk menganalisis pengaruh dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah, serta peran kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi dalam fenomena flypaper effect. Subjek yang diteliti adalah 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode sensus (*saturated sampling*), di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian mengingat jumlahnya relatif kecil dan ketersediaan data yang lengkap. Setiap kabupaten/kota diamati selama tiga periode tahun anggaran berturut-turut, yaitu 2021, 2022, dan 2023, sehingga menghasilkan total 72 unit observasi (24 kabupaten/kota × 3 tahun). Sumber data diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Variabel yang diteliti meliputi belanja daerah sebagai variabel dependen, dana transfer (meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan PAD sebagai variabel independen, serta kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi. Kapasitas fiskal diukur menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Definisi operasional masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Data
Belanja Daerah (BD) (Variabel Dependen)	Seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan.	1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Tak Terduga 4. Belanja Transfer	Rasio/Interval (Rupiah)	Laporan Realisasi APBD (Kemenkeu, BPK)
Dana Transfer (TRANSFER) (Variabel Independen)	Dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal.	1. Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Dana Bagi Hasil (DBH)	Rasio/Interval (Rupiah)	Laporan Realisasi APBD (Kemenkeu, BPK)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Variabel Independen)	Penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan	Rasio/Interval (Rupiah)	Laporan Realisasi APBD (Kemenkeu, BPK)

		Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah		
Kapasitas Fiskal (KF) <i>(Variabel Moderasi)</i>	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya dari sumber pendapatan yang dimiliki, khususnya PAD.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Rasio/Interval (Persentase)	Laporan Realisasi APBD (Kemenkeu, BPK)

Untuk menguji fenomena flypaper effect dan peran kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi, digunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian dilakukan dalam dua tahap: pertama, untuk menguji pengaruh dana transfer lebih besar dibandingkan PAD terhadap belanja daerah sebagai indikasi flypaper effect, dan kedua, untuk melihat apakah kapasitas fiskal memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut melalui analisis interaksi (moderated regression).

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
 $BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot TRANSFER_{it} + \beta_2 \cdot PAD_{it} + \beta_3 \cdot KF_{it} + \beta_4 \cdot (TRANSFER_{it} \times KF_{it}) + \epsilon_{it}$

Model regresi dikatakan menunjukkan adanya flypaper effect jika koefisien dana transfer (β_1) lebih besar daripada koefisien PAD (β_2) dan keduanya signifikan. Sementara itu, peran kapasitas fiskal sebagai moderasi ditunjukkan oleh koefisien interaksi (β_4) yang signifikan. Jika nilai β_4 negatif dan signifikan, maka kapasitas fiskal berperan memperlemah pengaruh transfer terhadap belanja daerah, dan sebaliknya, jika positif, kapasitas fiskal memperkuat pengaruh tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Flypaper Effect

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	72
Model	3.8950e+25	4	9.7375e+24	F(4, 67)	=	168.42
Residual	3.8737e+24	67	5.7817e+22	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9095
				Adj R-squared	=	0.9041
Total	4.2824e+25	71	6.0315e+23	Root MSE	=	2.4e+11

BD	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
PAD	1.292302	.1647961	7.84	0.000	.9633676 1.621236
DAUX1	1.446155	.377483	3.83	0.000	.6926955 2.199614
DAKX2	.7473126	.4778883	1.56	0.123	-.2065565 1.701182
DBHX3	.3806416	1.024814	0.37	0.711	-1.664895 2.426178
_cons	-6.18e+10	1.45e+11	-0.43	0.670	-3.50e+11 2.27e+11

Sumber: Hasil Olah Data Stata 16

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, ditemukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai koefisien untuk PAD sebesar 1,292 dan untuk DAU sebesar 1,446 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan PAD akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,292 satuan, sedangkan setiap peningkatan satu satuan

DAU akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,446 satuan. Hasil uji Flypaper Effect menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,9001, yang berarti model regresi ini dapat menjelaskan 90,01% variasi belanja daerah yang dipengaruhi oleh variabel PAD dan DAU. Nilai Prob > F sebesar 0.0000 juga mengindikasikan bahwa model regresi ini signifikan pada tingkat kepercayaan 99%, yang semakin menguatkan bahwa pengaruh dana transfer pusat (terutama DAU) terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD. Perbedaan nilai koefisien tersebut mengindikasikan bahwa belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD yang diperoleh secara mandiri oleh daerah.

Hasil ini selaras dengan konsep flypaper effect yang pertama kali dikemukakan oleh (Courant et al., 1979), yaitu fenomena ketika belanja daerah bereaksi lebih besar terhadap transfer pusat dibandingkan terhadap sumber pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan *Fiscal Decentralization Theory* (Oates, 1972), yang menegaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran secara mandiri dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kemandirian fiskal. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal melalui mekanisme transfer dana belum sepenuhnya mampu mendorong optimalisasi PAD sebagai sumber pendapatan utama. Sebaliknya, tingginya proporsi dana transfer justru memperkuat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga tujuan ideal desentralisasi fiskal sulit tercapai

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. (Abdillah, 2018) menunjukkan bahwa pada wilayah Ajatappareng, Sulawesi Selatan, belanja daerah lebih didorong oleh dana transfer dibandingkan PAD. (Fitrianti et al., 2025) juga menemukan pola serupa di tingkat provinsi, di mana transfer fiskal pusat memiliki pengaruh lebih dominan terhadap belanja daerah dibandingkan PAD. Penelitian (A et al., 2022) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa flypaper effect lebih kuat terjadi pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sementara (Mendra et al., 2024) di Sumatera Barat menunjukkan bahwa respons belanja terhadap dana transfer cenderung lebih besar dibandingkan PAD di hampir seluruh kabupaten/kota.

Penelitian lain, seperti (Purba & Susilo, 2024) di Provinsi Sumatera Utara, menegaskan bahwa fenomena flypaper effect tidak hanya memengaruhi pola alokasi belanja, tetapi juga dapat berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, (Farica & Wijaya, 2023) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa tingginya respons belanja terhadap transfer pusat dapat menghambat optimalisasi potensi PAD karena belanja lebih diprioritaskan berdasarkan ketersediaan dana transfer daripada kapasitas pendapatan asli.

Dengan demikian, temuan empiris ini memperkuat bukti bahwa fenomena flypaper effect masih terjadi secara nyata di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dominasi pengaruh dana transfer, khususnya DAU, menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih menjadi karakteristik utama pengelolaan keuangan daerah di wilayah ini.

Pengaruh Flypapper Effect terhadap Belanja Daerah dimoderasi oleh Kapasitas Fiskal
Tabel 2. Statistik Deskriptif

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	72
Model	3.8885e+25	4	9.7214e+24	F(4, 67)	=	165.38
Residual	3.9384e+24	67	5.8782e+22	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9080
				Adj R-squared	=	0.9025
Total	4.2824e+25	71	6.0315e+23	Root MSE	=	2.4e+11

BD	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
PAD	3.316642	1.971725	1.68	0.097	- .6189381 7.252222
DAUX1	1.884917	.2652565	7.11	0.000	1.355463 2.414371
Interaksi1	-3.339327	2.834689	-1.18	0.243	-8.99739 2.318736
Interaksi2	-1.889137	2.12323	-0.89	0.377	-6.127121 2.348847
_cons	-9.17e+10	1.36e+11	-0.68	0.501	-3.62e+11 1.79e+11

Sumber: Hasil Olah Data Stata 16

Pengujian terhadap interaksi kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Flypaper Effect dan belanja daerah menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Meskipun kapasitas fiskal berperan dalam memengaruhi belanja daerah, pengaruhnya tidak cukup signifikan untuk mengubah hubungan antara transfer fiskal pusat dan pengeluaran daerah. Hal ini tercermin dari nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 pada variabel interaksi, yaitu Interaksi1 (DAU × Kapasitas Fiskal) sebesar 0,243 dan Interaksi2 (PAD × Kapasitas Fiskal) sebesar 0,377. Ketidaksignifikanan variabel moderasi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa meskipun daerah memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, khususnya DAU, tetap menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi pengeluaran daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kemandirian fiskal dalam pengelolaan belanja daerah. Hal ini sejalan dengan temuan (Iskandar, 2021) yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal tinggi tidak selalu mengurangi ketergantungan pada transfer pusat jika pola kebijakan pengeluaran daerah masih berbasis pada alokasi dana transfer. (A et al., 2022) juga menegaskan bahwa flypaper effect dapat tetap terjadi bahkan pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi apabila ketergantungan historis terhadap dana transfer telah mengakar dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian seperti (Mendra et al., 2024) di Sumatera Barat yang menemukan bahwa kapasitas fiskal dapat memperlemah pengaruh flypaper effect. Namun, kesenjangan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik fiskal antarprovinsi, di mana Provinsi Sulawesi Selatan memiliki proporsi dana transfer yang relatif besar terhadap total pendapatan daerah sehingga efek moderasi kapasitas fiskal menjadi kurang signifikan. (Purba & Susilo, 2024) juga menegaskan bahwa besarnya porsi transfer fiskal pusat dalam pendapatan daerah menjadi faktor utama yang mempertahankan tingginya flypaper effect meskipun kapasitas fiskal meningkat.

Dari perspektif teori yang dikemukakan dalam literatur keuangan publik seperti (Mardiasmo, 2018), pengelolaan keuangan daerah yang sehat memerlukan keseimbangan antara kemandirian fiskal dan pemanfaatan dana transfer secara efektif. Kemandirian fiskal bukan hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kemampuan daerah mengalokasikan belanja secara produktif dan mengoptimalkan PAD. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kapasitas fiskal di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat maupun melemahkan pengaruh flypaper effect terhadap belanja daerah. Untuk itu, kebijakan peningkatan kapasitas fiskal perlu diiringi dengan reformasi kebijakan

pengeluaran publik yang lebih berbasis pada potensi PAD guna memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan adanya fenomena flypaper effect pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana belanja daerah cenderung lebih dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerah. Hasil ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengidentifikasi pola hubungan tersebut, sekaligus menguji peran kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi. Meskipun kapasitas fiskal memiliki peran dalam pengelolaan keuangan daerah, pengaruhnya belum cukup untuk mengurangi dominasi dana transfer dalam mendorong belanja daerah. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan kemandirian fiskal yang lebih efektif, serta mengkaji model kebijakan belanja daerah yang mampu memanfaatkan potensi pendapatan lokal secara optimal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada cakupan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan hanya menggunakan variabel PAD serta DAU sebagai indikator utama. Keterbatasan ketersediaan data sekunder serta belum dimasukkannya variabel fiskal dan non-fiskal lain dapat memengaruhi kedalaman analisis. Selain itu, pendekatan kuantitatif yang digunakan belum mengungkap faktor kontekstual yang mungkin berpengaruh terhadap hubungan yang diteliti.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan memasukkan variabel fiskal lainnya seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta faktor non-fiskal yang relevan. Selain itu, penggunaan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi flypaper effect dan belanja daerah.

REFERENSI

- A, M. Y., Setiawati, E., & Zulfikar, Z. (2022). *Flypaper Effect on Regional Expenditure and the Imp on Regencies/Municipalities Financial Performance in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220602.054>
- Abdillah, M. A. (2018). FLYPAPER EFFE CT: FENOMENA SERIAL WAKTU DAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DI DAERAH AJATAPPARENG PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i2.571>
- Amrisal, A., Mallongi, S., & Selong, A. (2024). The Effect of Regional Original Revenue, GDP, and Capital Expenditure on Regency/City Fiscal Distress in South Sulawesi. *Jurnal Economic Resource*, 7(2), 14–23. <https://doi.org/10.57178/jer.v7i2.941>
- Courant, P. N., Gramlich, E. M., & Rubinfeld, D. L. (1979). *The stimulative effects of intergovernmental grants: Or why money sticks where it hits*. In P. Mieszkowski & W. H. Oakland (Eds.), *Fiscal federalism and grants-in-aid* (pp. 5–21). The Urban Institute Press.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data kapasitas fiskal daerah 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Farica, W., & Wijaya, R. S. (2023). The Flypaper Effect Phenomena in Regional Expenditure in Districts/Cities of the Special Province of Yogyakarta. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 3(4), 1347–1362. <https://doi.org/10.55927/ijba.v3i4.5154>
- Fitrianti, R., Zaenal, M., Fattah, S., & Hidayah, N. (2025). Flypaper effect: Analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 14(1), 54–64. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.05](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05)
- Iskandar, A. (2021). Analysis of regional financial independence, potential for growth, and health services: A case study of regencies/cities in South Sulawesi. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 59–76. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.505>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mendra, H., Handra, H., & Yonnedi, E. (2024). Flypaper Effect in the Allocation of Regional Expenditure in Regency/City in West Sumatra Province. *JOURNAL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)*, 4(1), 167–175. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v4i1.1538>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Purba, K. A., & Susilo. (2024). PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KOMPARASI PEMERINTAH KOTA DENGAN KABUPATEN). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 689–696. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.02>